

ANALISIS TRANSFER FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH

Yusri Hazmi
Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe
yusri.poltek@gmail.com

Abstract

Implementation of regional autonomy in Indonesia is not included in community capacity building and inequality among regions. Creation is still constrained by the regional authorities in the plan and allocates its own regional finances. Dependency dependence dependency dependence dependency dependence dependency government government government government In addition, regional imbalances still continue to occur, resulting in development. In other parts of the region still exist, much has changed in the amount of money primarily to reduce poverty. The review related to fiscal transfer capacity is interesting to do. From the results of the study obtained from the transfer capacity is not proportional to the tax requirement, tax transfer can be done in the regions.

Keywords: GRDP, DAU, DBH Tax, DBH SDA, Government expenditure and residents.

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum menunjukkan perubahan pada terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan antar wilayah. Pelaksanaan masih terkendala pada kewenangan daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber keuangan daerah sendiri. Sehingga ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat menjadi tinggi. Selain itu ketimpangan daerah masih terus terjadi, sehingga terjadi kesenjangan capaian pembangunan. Pada sisi lain pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam peningkatan anggaran terutama untuk mengurangi angka kemiskinan. Kajian sehubungan dengan kapasitas transfer fiskal menarik untuk dilakukan. Dari hasil kajian diperoleh bahwa kapasitas transfer fiskal tidak sebanding dengan kebutuhan fiskal daerah, sehingga transfer fiskal mampu memenuhi kebutuhan fiskal di daerah.

Kata Kunci : PDRB, DAU, DBH Pajak, DBH SDA, Pengeluaran pemerintah dan penduduk.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum memberikan dampak positif terciptanya peningkatan kesejahteraan. Merujuk pada Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang otonomi

di Indonesia, yang dapat dimaknai pada dua sisi, yaitu politik dan ekonomi. Secara politik otonomi menunjukkan peningkatan kewenangan daerah dalam perencanaan dan proses pengambilan kebijakan. Namun dari sisi ekonomi

masih belum optimal kewenangan daerah dalam melakukan perencanaan dan pengalokasian sumber keuangan di daerah. Daerah masih terjadi ketergantungan pada fiskal pemerintah pusat. Kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah, dengan merujuk pada UU 32 tahun 2004 dan UU 33 tahun 2004, bertujuan untuk menyelaraskan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro, memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Jalan desentralisasi ditempuh untuk melepaskan diri dari perangkap pengelolaan pemerintahan yang tidak efektif dan tidak efisien, ketidakstabilan ekonomi makro, dan tidak memadainya pertumbuhan ekonomi (Hamid, 2005).

Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah sejauh ini masih menunjukkan kendala, yaitu besaran

transfer, pemerataan alokasi DAU, disparitas kapasitas fiskal antara wilayah (Simanjuntak, 2005). Mengingat transfer fiskal memiliki bagian terbesar dari penerimaan daerah, yang seharusnya dapat mendorong tercapai pembangunan. Hofman, et.al (2006) menyebutkan bahwa pelaksanaan transfer fiskal dalam bentuk *block grant* (Dana Alokasi Umum) belum mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan pemerataan kapasitas fiskal antar daerah yang berdampak pada tercapainya kinerja pembangunan di daerah. Berbagai kondisi seperti; politik, ekonomi, kebutuhan fiskal daerah dan demografi telah menjadi penghambat. Karakteristik demografi bersifat alamiah sebagai akibat kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi fiskal yang tercermin pada ketahanan (*strength*) serta berkelanjutan (*sustainability*). Bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesempatan kerja di daerah. Kesinambungan fiskal menjadi ukuran kinerja ketahanan fiskal, terutama pada kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dengan demikian ketahanan fiskal berkaitan dengan kemampuan memenuhi anggaran,

termasuk kebutuhan transferfiscal ke daerah.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan pada lebih lanjut, pembangunan ekonomi ditujukan pada penyediaan prasarana social seperti; program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Wagner mengemukakan teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dengan pertumbuhan perekonomian, pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Pandangan ini disebut teori organics

II. TINJAUAN PUSTAKA

mengenai pemerintah (*organic theory of the state*), yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Sistem transfer dari pusat ke daerah dengan desain yang baik merupakan syarat suksesnya pelaksanaan desentralisasi. Pengalaman dan praktik transfer pusat ke daerah di beberapa Negara dapat dijadikan sebagai rujukan (Martinez, 2001).

Penelitian ini mengkaji pengaruh transfer fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Aceh. Dengan variabel penelitiannya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta jumlah penduduk. Dengan menggunakan data runtun waktu runtun kuartalan mulai

Hasil pengolahan data diporeh hasil:

Dengan tanda koefisien positif maka variabel perubahan DAU secara signifikan mempengaruhi perubahan Pengeluaran Daerah. Jika perubahan DAU mengalami peningkatan maka akan dibarengi dengan naiknya perubahan pengeluaran Daerah. Kesignifikanan terjadi karena perubahan DAU merupakan sumber utama pengeluaran daerah terutama untuk pembiayaan aparatur pemerintahan daerah Propinsi Aceh.

Dengan tanda koefisien positif maka variabel perubahan DBH Pajak secara signifikan mempengaruhi

III. METODE PENELITIAN

tahun 2000 sampai tahun 2010. Model analisis ekonometrik yang digunakan adalah:

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$PD_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DBHP_t + \beta_3 DBHSDA_t + \beta_5 PAD_t + \varepsilon_t$$

$$PDRB_t = \beta_0 + \beta_6 PD_t + \beta_7 JP_t + \varepsilon_t$$

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

$$D(PD) = 28,274 + 19,094 D(DAU) + 4,792 D(DBHP) + 0,623 D(DBHSDA) - 9,688 D(PAD)$$

perubahan Pengeluaran Daerah. Jika perubahan DBH Pajak mengalami peningkatan maka akan dibarengi dengan naiknya perubahan Pengeluaran Daerah. Kesignifikanan terjadi karena perubahan DBH Pajak merupakan salah satu alternatif sumber utama dari pembiayaan terhadap pengeluaran daerah, yang mana DBH Pajak merupakan pembagian dari Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan berbagai pungutan untuk pembiayaan pembangunan.

Dengan tanda koefisien positif maka variabel perubahan DBH Sumber Daya Alam tidak signifikan

mempengaruhi perubahan Pengeluaran Daerah. Jika perubahan DBH Sumber Daya Alam mengalami peningkatan maka akan dibarengi dengan naiknya perubahan Pengeluaran Daerah. Ketidaksignifikan terjadi karena perubahan DBH Sumber Daya Alam tidak dianggap oleh Pemerintah Propinsi Aceh sebagai salah satu sumber utama dari pembiayaan terhadap pengeluaran daerah. DBH Sumber Daya Alam merupakan pembagian dari Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan berbagai pungutan untuk pembiayaan pembangunan bisa dikatakan relatif kecil penerimaannya oleh pemerintah daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

Dengan koefisien negatif maka variabel perubahan PAD tidak signifikan mempengaruhi perubahan Pengeluaran Daerah. Jika perubahan PAD mengalami peningkatan maka akan dibarengi dengan turunnya perubahan Pengeluaran Daerah. Terjadi perubahan PAD tidak memberikan sumbangsih perubahan

Interpretasi Model

Dengan koefisien positif maka variabel Pengeluaran Daerah signifikan mempengaruhi PDRB. Jika Pengeluaran Daerah mengalami peningkatan maka

Pengeluaran Daerah. Hal ini menunjukkan ketidakmandirian Pemerintah Daerah Propinsi Aceh dalam pembiayaan pembangunan dan kebutuhan aparaturnya sehingga masih sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Persamaan yang kedua adalah Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan persamaan penelitian dipengaruhi oleh Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk. Adapun koefisien untuk masing-masing variabel persamaan pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Variabel	Koefisien	t-star	Sign.
1	C	-60,242	8,691***	0,000
2	PD	0,002	9,477***	0,000
3	JP	0,063	9,373***	0,000

n = 39

$R^2 = 0,883$

F-star = 139,718

F-sign. = 0,000

DW-star = 1,312

Catatan :

*** Signifikan pada α 1%

** Signifikan pada α 5%

* Signifikan pada α 10%

$$\text{PDRB} = -60,242 + 0,002 \text{ PD} + 0,063 \text{ JP}$$

akan dibarengi dengan naiknya PDRB. Kesignifikanan terjadi karena sistem pembiayaan APBN dan APBD yang berorientasi pada pengeluaran.

PDRB dianggap sebagai pendapatan suatu daerah untuk pengeluaran daerah.

Dengan tanda koefisien positif maka variabel Jumlah Penduduk signifikan mempengaruhi PDRB. Jika Jumlah Penduduk mengalami peningkatan maka akan dibarengi dengan naiknya PDRB. Kesignifikan terjadi karena Jumlah Penduduk merupakan

potensi dari pendapatan daerah melalui berbagai pungutan dan produktivitasnya yang tercermin dalam PDRB. Dengan peningkatan jumlah penduduk terutama di kelompok usia produktif akan menambah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja sehingga akan sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB di masa mendatang.

Konsep, Hambatan dan Prospek Di Era Otonomi Daerah, LPEM Universitas Indonesia, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Hamid, Edy Suandi. (2005) Formula Alternatif Dana Alokasi Umum, UII Press, Yogyakarta. Cetakan Pertama.

Hofman, Bert., Kadjatmiko, Kai Kaiser, dan Bambang Suharnoko Sjahrir, 2006, *Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia, World Bank Policy Research Working Paper 3911*.

Mertinez, Jorge Vazquez. (2001). *Principles for the Design of equalization Grants, Indonesia, Workshop on Decentralization in Indonesia*.

Undang-Undang No. 32 Tahun. (2004). Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun. (2004) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah

Simanjuntak, R.A., dan Djoko Hidayanto. (2005). Dana Alokasi Umum di Masa Depan, dalam Dana Alokasi Umum: